

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Arnstein, Sherry R. (1971). "Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation" in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet. *Citizen Participation: Effecting Community Change*. New York: Praeger Publishers.
- Peters, B. Guy, Tahun (1996), *the Feature of Governing; Four Emerging Models*, University Press of Kansas.
- B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi partisipasi masyarakat Dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar., Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriastuti. Jakarta : Selemba Empat.
- Cooke, Bill & Kothari, Uma, Tahun (2002), *Participation: the New Tyranny?*, Zed Books, London.
- Fitriastuti, Nurwi Mayasri, (2005). *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*. Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gaventa, Jhon & Valderama, Camilo, Tahun (2001), *Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah*, dalam pengantar buku, *Mewujudkan Partisipasi; Teknik, Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*, The British Council dan New Economics Fondation.
- H.A.R.Tilaar. (2009). *Kekuasaan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta : Rini Cipta.
- Hall, dkk. (2006). *Community Participation, Social Development and State*. London, Methven & Co.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan P.T Balai Pustaka, Jakarta 200.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996) Jakarta: Balai Pustaka.

Muluk, M. R. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mulyasa, E. (2004). *Menjadi Kepala Sekolah PROFESIONAL, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Oakley, Petter, dkk. (1991). *Project with People, The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo.

Pridata, M. (1990). *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Mendekatkan System*. Jakarta.

Sastropoetro, R. S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.

#### **Jurnal:**

Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangandan Aspek Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 2.

Dewi, Sinta., (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia, *Jurnal De Jure*. Vol. 15, No. 2.

Dewi, Sinta, (2017). Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212, 2017

Djafar, Wahyudi. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui

Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol (17) No. 3 - September, hal. 282-293.

- Fitriastuti, N. M. (2005). Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD). 41.
- Hidayati, Siti. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang (studi perbandingan indonesia dengan afrika selatan), *Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2.
- Nurhidayati, S. K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindung. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Volume 5 No. 1 .
- Mahardika, A. G. (2021). DESAIN IDEAL PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol 37 No.2.
- Mariana, D. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2 .
- Masitoh Indriyani, N. A. (2017). PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA ONLINE MARKETPLACE SYSTEM. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Volume 1 No.2.
- Muhamad Hasan Rumlus, H. H. (2020). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2.
- Purnama, T. D. (2021). PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA,. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* , Volume 4 Nomor 3 .
- Sofwan. (2022). URGENSI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *JATISWARA*. Vol. 37 No. 1 , 125.

#### **Internet:**

- Andika, P. V. (2022, januari 11). *Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik*. Diambil kembali dari

<https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

Firdaus, F. R. (2020, November Selasa). *hukumonline.com*. Diambil kembali dari Di Tahap

*Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?*;

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b#\\_ftnref18](https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b#_ftnref18), Diakses pada 13 September 2022, pukul 18.52 WIB.

Febrinandez, H. L. (2022, Juni Rabu). *PARTISIPASI PUBLIK DAN FAKTOR PENGHAMBAT PROSES LEGISLASI RUU PDP DAN PERUBAHAN KEDUA UU ITE*. Retrieved from

The Indonesian Institute: <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2022/06/Polass-Hemi-Penghambat-Proses-Legislati-RUU-PDP-dan-Perubahan-Kedua-terhadap-UU-ITE.pdf> , Diakses pada 5 Agustus 2022, pukul 12.45 WIB.

Hadjon, M. Keterbukaan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis”, *Pidato*, diucapkandalam Lustrum III Ubhara Surya dalam Griadhi dan Sri Utari, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3257/2336>.

KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 21 September 2022, pukul 14.30 WIB.

KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada 21 September 2022, pukul 14.47 WIB.

Khotib, A. (2016, Oktober Minggu). *Partisipasi Publik a’la Arnstein* . Retrieved from

Kompasiana: [https://www.kompasiana.com/ahmadkhotib/57f93f984c7a619e2cb96ea7partisipasi-publik-ala-arnstein?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ahmadkhotib/57f93f984c7a619e2cb96ea7partisipasi-publik-ala-arnstein?page=2&page_images=1) , diakses pada 20 Agustus, pukul 10.37 WIB.

Rizkinawara, L. (2022, Agustus 22). *Data Pelanggan PLN Bocor, Kominfo: Sudah Dipanggil dan Terus Dipantau*. Diambil kembali dari [aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id): <https://aptika.kominfo.go.id/2022/08/data-pelanggan-pln-bocor-kominfo-sudah-dipanggil-dan-terus-dipantau>

Riznikanawara, L. (2021, Mei 24). *Kominfo Investigasi Dugaan Kebocoran Data KTP*. Diambil kembali dari [aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id): <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-investigasi-dugaan-kebocoran-data-ktp>.

R, M. A. (2016, Maret Minggu). Baca artikel detiknews, "*Duh! Sales Kartu Kredit Gadungan ini Gunakan Uang Haram Buat Naik Haji*" Retrieved from [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji): <https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji> , Diakses pada tanggal 24 Juli 2022, pukul 14.30WIB.

Wahyudi, Djafar dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, *Protection of personal data in Indonesia*, dalam <http://weekly.cnbnews.com/> , Diakses pada 24 Juli 2022, pukul 15.12 WIB.

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi.